



## **Renja Perubahan Tahun 2020**

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KAB. LUWU  
TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, Juli 2020



**KEPALA PELAKSANA,**

**Drs. MUH. ZABUR**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	5
1.3    Maksud dan Tujuan .....	8
1.4    Sistematika Penulisan.....	9
BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3    Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	59
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.....	63
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	64
BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	76
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	76
3.1    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	80
3.3    Program dan Kegiatan.....	82
BAB IV    PENUTUP.....	97

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- Tabel 2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2020
- Tabel 4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
- Tabel 5 : Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2020
- Tabel 6 : Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2020

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

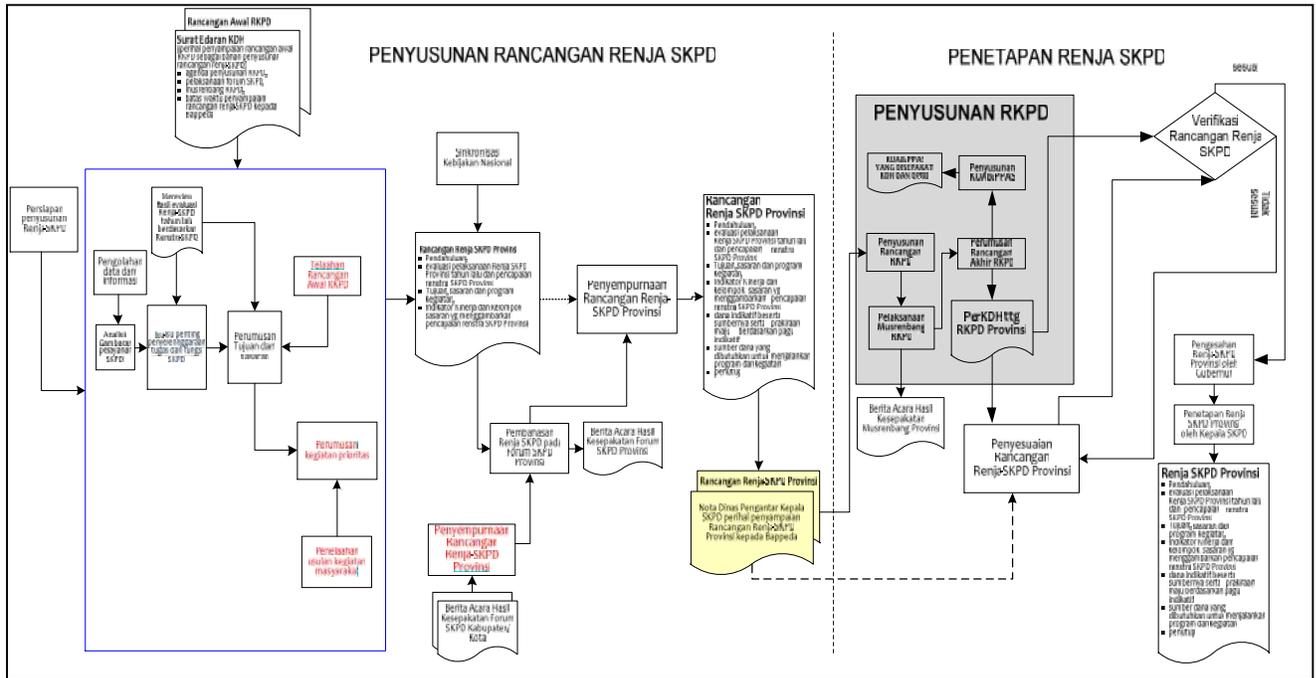
Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2020.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

Rencana Kerja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penganggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD 2016-2021.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal

mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2020 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2020 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.

5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2020.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN,** Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,** Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2021 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 s.d Tahun berjalan(\*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL.1 (TC.29)**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2020**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2020 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja SKPD 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	WAJIB									
1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi								

1	05	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	1700 surat	0 Surat	850 surat	822 surat	96.71 %	850 surat	1.672 surat	98.35 %
1	05	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	300 rekening	180 Rekening	44 rekening	39 rekening	88.64 %	48 rekening	267 rekening	89 %
1	05	02	01		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan	5 orang	5 orang	0 orang	0 orang	0 %	- org	5 orang	100 %
1	05	02	01	06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100 %	1 org	1 orang	100 %
1	05	02	01	07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	456 unit	133 unit	72 unit	28 unit	39 %	90 unit	251 unit	55 %
1	05	02	01	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	50 jenis	0 jenis	50 jenis	48 jenis	96 %	50 Jenis	50 Jenis	100 %
1	05	02	01	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	0 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %
1	05	02	01	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100 %	8 jenis	8 jenis	100 %
1	05	02	01	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2000 kotak	0 kotak	875 kotak	537 kotak	61.37 %	1000 kotak	1537 kotak	76.85 %

1	05	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 ekplr	178 expl	60 expl	60 expl	100 %	60 exp l	298 expl	83 %
1	05	02	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	0 jenis	2 jenis	2 jenis	100 %	2 jeni s	2 jenis	100 %
1	05	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang ikuti/dilaksanakan (kali)	191 kali	186 kali	48 kali	69 kali	144 %	60 kali	315 Kali	165 %
1	05	02	01	19	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	52 oran g	49 orang	4 orang	3 orang	75 %	4 org	51 oran g	98 %
1	05	02	01	21	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	20 dok	12 dok	4 dok	4 dok	100 %	4 dok	20 dok	100 %
1	05	02	01	22	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 Jenis	100 %	8 jeni s	8 jenis	100 %
1	05	02	01	23	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	649 kali	326 kali	231 kali	249 Kali	107.79 %	209 Kali	784 Kali	121 %
1	05	02	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang</b>							-	

						terpenuhi									
1	05	02	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 unit	2 unit	0 unit	01 Unit	- %	0 unit	2 unit	100 %	
1	05	02	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	10 unit	5 unit	0 unit	0 Unit	- %	0 unit	5 unit	50 %	
1	05	02	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	11 unit	4 unit	1 unit	1 Unit	100.00 %	0 unit	5 unit	45 %	
1	05	02	02	12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	128 unit	72 unit	11 unit	11 Unit	100 %	18 unit	101 unit	79 %	
1	05	02	02	13	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %	0 unit	1 unit	100 %	
1	05	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	10 unit	6 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	10 unit	100 %	
1	05	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100 %	10 unit	10 unit	73 %	
1	05	02	02	57	Pembangunan Pagar Kantor	Jumlah pagar kantor yang dibangun	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %	
1	05	02	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan</b>									

						<b>pakaian hari-hari tertentu</b>								
1	05	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	49 psg/org	23 psg/org	0 psg/org	0 psg/org	#DIV/0! %	- psg/org	23 psg/org	47 %
1	05	02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu	102 psg/org	32 psg/org	0 psg/org	0 psg/org	0 %	- psg/org	32 psg/org	31 %
1	05	02	04		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya								
1	05	02	04	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur/upah jasa yang mengikuti pelatihan, bimtek dan diklat (orang)	50 orang	42 orang	10 org	17 org	170 %	10 org	69 orang	138 %
1	05	02	05		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>								
1	05	02	05	06	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	4 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	4 dok	100 %
1	05	02	05	08	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	6 dok	0 dok	3 dok	3 dok	100 %	3 dok	6 dok	100 %

1	05	02	06		<b>Program perencanaan dan penganggaran SKPD</b>	<b>persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu</b>								
1	05	02	06	01	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	18 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100.00 %	6 dok	18 dok	100 %
1	05	02	60		<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	<b>Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi</b>								
1	05	02	60	06	Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	100 %
1	05	02	60	07	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	5 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100 %	3 unit	8 unit	160 %
1	05	02	60	08	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	6 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	6 unit	100 %
1	05	02	60		Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Jumlah pengaman sungai yang dibangun	8 unit	8 unit	0 unit	0 unit	0 %	- unit	8 unit	100 %

1	05	02	60	10	Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %
1	05	02	60		Perbaikan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana yang diperbaiki	10 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	- unit	- %
1	05	02	60	13	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %
1	05	02	23		<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase meningkatnya upaya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>								
1	05	02	23	01	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (KP.1)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang diadakan	93 unit	93 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	93 unit	100 %
1	05	02	23	02	Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	Tersedianya operasional kesiapsiagaan Satgas Damkar	12 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	#DIV/0! %	- bulan	12 bulan	100 %
1	05	02	23		<b>Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran</b>	<b>Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan risiko bencana</b>								

1	05	02	23	01	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya pembayaran retensi pos damkar	3 paket	3 paket	0 paket	0 paket	0 %	- paket	3 paket	100 %
1	05	02	23	06	Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	Jumlah dokumen pemetaan ancaman bencana yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	0 Dokumen	1 Dokumen	50 %
1	05	02	23	07	Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	600 orang	594 orang	0 orang	0 orang	0 %	- org	594 orang	99 %
1	05	02	23	08	Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	500 orang	240 orang	0 orang	0 orang	0 %	- org	240 org	48 %
1	05	02	23	;09	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	500 orang	236 orang	0 orang	0 orang	0 %	- org	236 org	47 %
1	05	02	23	10	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	200 unit	101 unit	0 unit	0 unit	0 %	- unit	101 unit	51 %
1	05	02	23	11	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	3 kali	1 Kali	0 kali	10 kali	0 %	- Kali	1 Kali	33 %

1	05	02	23	12	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 kali	1 Kali	0 kali	0 kali	0 %	- kali	1 kali	50 %
1	05	02	23	13	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	100 orang	50 orang	0 orang	0 orang	10 %	- org	50 org	50 %
1	05	02	53		<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	<b>Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender</b>								
1	05	02	53	01	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 Kejadian	50 Kejadian	10 Kejadian	72 Kejadian	720 %	10 Kejadian	132 Kejadian	264 %
1	05	02	53	02	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	50 Kejadian	32 Kejadian	10 Kejadian	47 Kejadian	470 %	10 Kejadian	89 Kejadian	178 %
1	05	02	53	03	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	25 Kejadian	8 Kejadian	5 Kejadian	6 Kejadian	120 %	5 Kejadian	19 Kejadian	76 %
1	05	02	53	04	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Tim Reaksi Cepat laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	30 orang	19 orang	30 orang	30 orang	100 %	30 org	30 org	100 %

1	05	02	62		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana																
1	05	02	62	01	Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	Jumlah dokumen pemetaan ancaman bencana yang tersusun	1	Dokumen	0	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	#DIV/0!	%	0	Dokumen	0	Dokumen	0	%
1	05	02	62	02	Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	300	orang	0	orang	150	orang	149	orang	99.33	%	150	org	299	orang	100	%
1	05	02	62	03	Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	300	orang	0	orang	150	orang	147	orang	98	%	150	org	297	Org	99	%
1	05	02	62	04	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	300	orang	0	orang	150	orang	141	orang	94	%	150	org	291	Org	97	%
1	05	02	62	05	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	158	unit	0	unit	27	unit	27	unit	100	%	32	unit	59	unit	37	%
1	05	02	62	06	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	4	kali	0	Kali	1	kali	1	kali	100	%	2	Kali	3	Kali	75	%

1	05	02	62	07	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	4 kali	0 Kali	1 kali	1 kali	100 %	2 Kali	3 Kali	75 %
1	05	02	62	08	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	100 orang	0 orang	50 orang	50 orang	100 %	50 org	100 Org	100 %
1	05	02	24		<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana</b>								
1	05	02	24	01	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	1 kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0! %	- kali	1 Kali	100 %
1	05	02	27		<b>Program Kesiapsiagaan</b>	Persentase peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana								
1	05	02	27	03	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	1 kali	1 Kali	0 kali	0 Kali	#DIV/0! %	- kali	1 Kali	100 %
1	05	02	28		<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase tim relawan BPBD yang ditingkatkan kapasitasnya</b>								
1	05	02	28	01	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah tim relawan laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	102 orang	102 orang	0 org	0 org	#DIV/0! %	- org	102 orang	100 %

1	05	02	31		<b>Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun</b>								
1	05	02	31	01	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	1 unit	100 %
1	05	02	32		<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun</b>							-	
1	05	02	32	01	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun (penyusunan DED)	1 Dok	1 Dok	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	1 Dok	100 %

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang *ex officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel. 2 (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Luwu Timur**

NO	Indikator	SPM/sta ndar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase masyarakat yang mendapat Pengetahuan kebencanaan (%)	-	-	1.07	0.63	0.63	-	1.03	0.61	0.63	-	
2	Persentase penanganan bencana (%)	-	-	94,12	97,06	100	-	100	100	100	-	
3	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (%)	-	-	27.27	18.18	18.18	-	27.27	18.18	18.18	-	
4	Jumlah Skor Lakip	-	-	55	60	70	-	90,86	80.55	70	-	

- ❖ Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2019 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Sasaran, Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

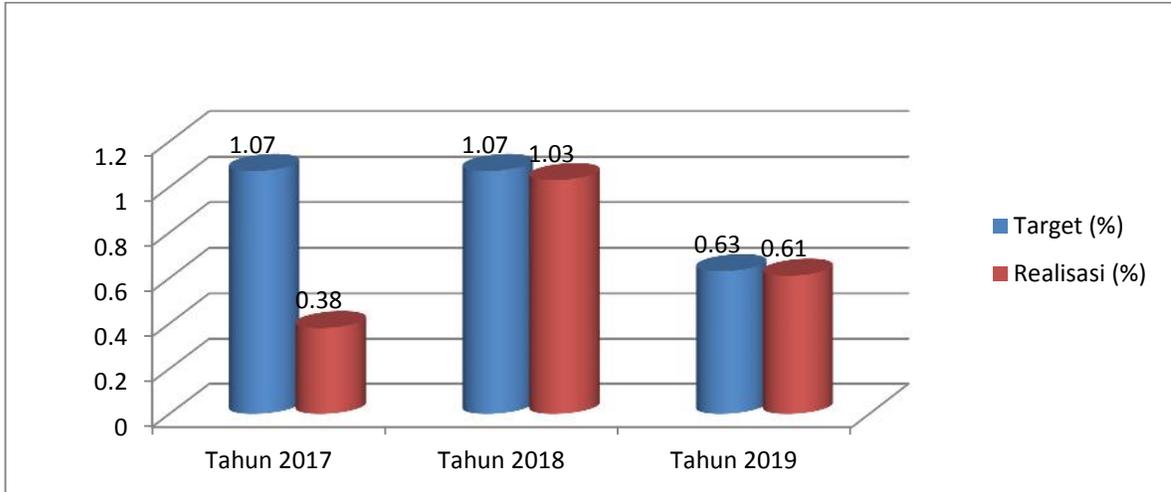
**Tabel. 1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0.63%	0.61%	96.83
2.	Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana	97.06%	100%	103.03
3.	Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	18.18%	18.18%	100
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Jumlah Skor Lakip	70	80,55	115.07

## Sasaran Strategis I

Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

“Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan”

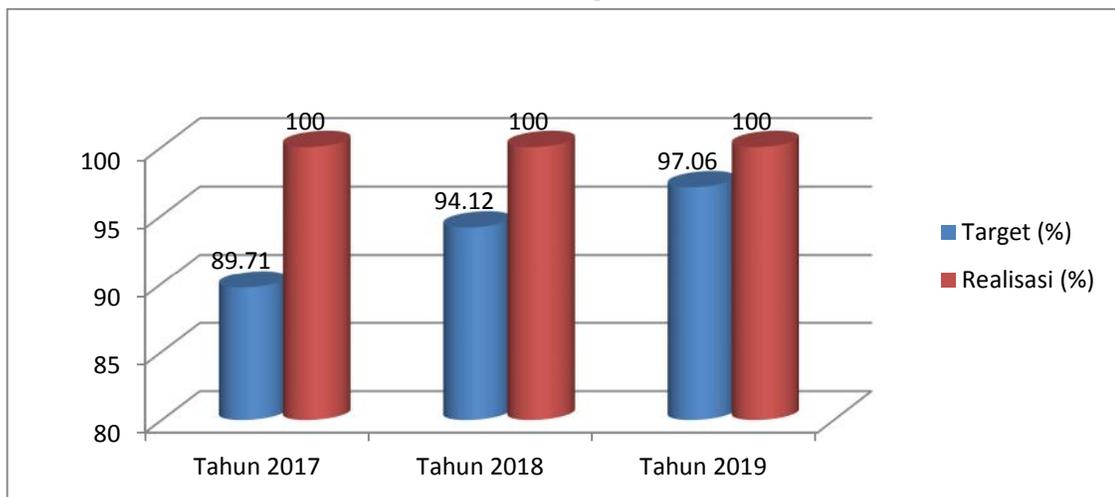


Grafik. 3

## Sasaran Strategis 2

Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana

“Persentase Penanganan Bencana”

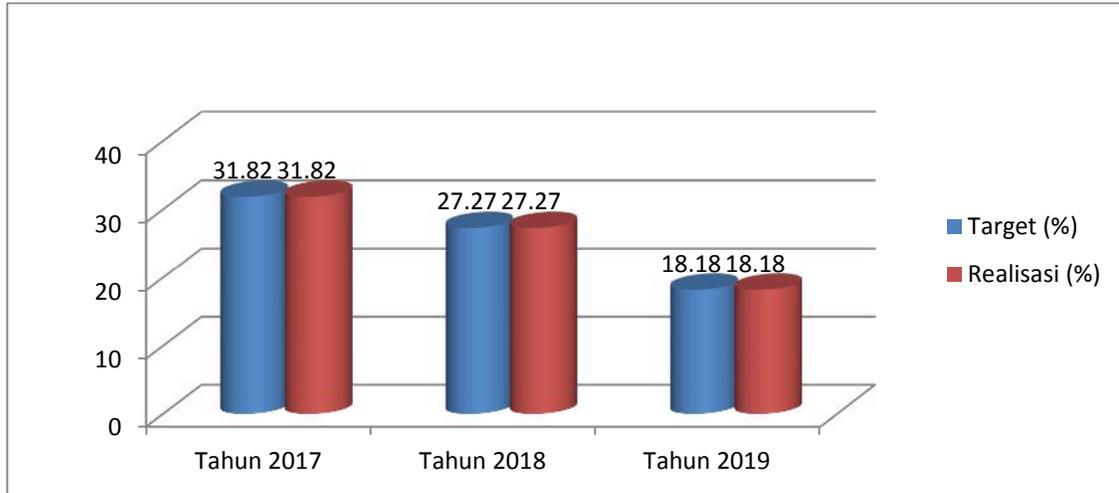


Grafik. 4

### Sasaran Strategis 3

Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta

“Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi”

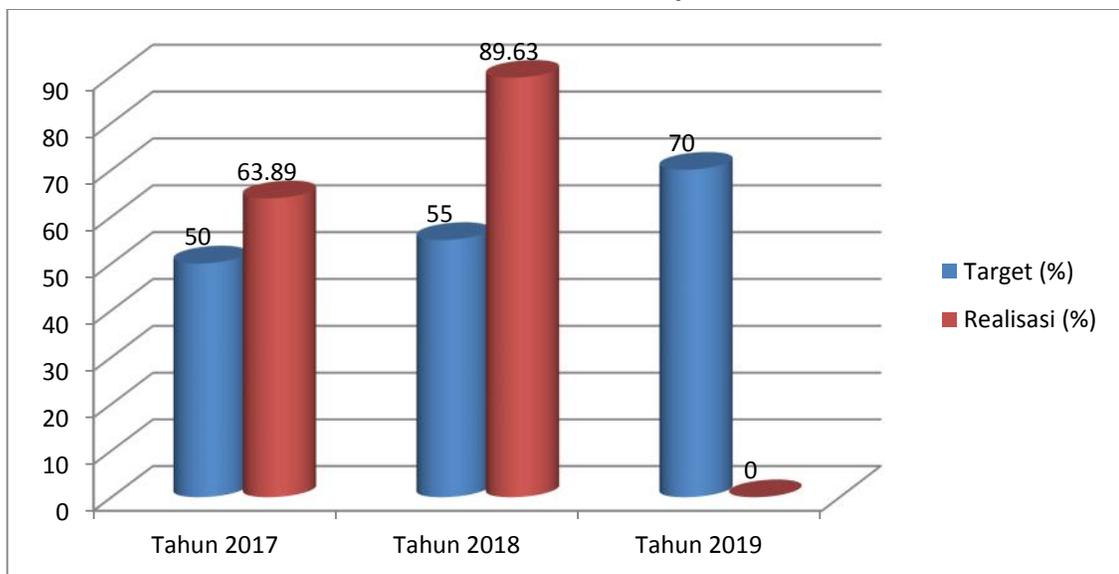


Grafik. 5

### Sasaran Pendukung

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD

“Jumlah Skor Lakip”



Grafik. 6

## Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program dan kegiatan. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

### SASARAN STRATEGIS 1

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama “**Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana**” tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Capaian Kinerja Sasaran ke -1**

Sasaran I	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		
	Tahun 2019		
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0.63%	0.61%	96.83%

#### 1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2019

##### Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “(Jumlah masyarakat pada daerah rawan bencana yang mendapat pengetahuan kebencanaan dibagi total seluruh masyarakat pada daerah rawan bencana x 100%)”

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah 0.63% dan terealisasi 0.61%, dengan persentase capaian sebesar 96.83%. Jumlah masyarakat pada daerah rawan bencana yang ditargetkan untuk mendapatkan pengetahuan kebencanaan sebanyak 500 orang namun yang terealisasi hanya 487 orang.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yaitu :

- Pemetaan Potensi Ancaman Bencana
- Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
- Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- Apel Siaga Bencana
- Simulasi Penanggulangan Bencana
- Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat

➤ Hambatan/Kendala

Tidak tercapainya target disebabkan karena jumlah peserta yang diundang pada beberapa kegiatan kebencanaan yang diadakan, namun yang hadir tidak sesuai target. Hal ini dapat disebabkan karena tempat pelaksanaan terpusat disuatu tempat sementara peserta yang diundang berasal dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Hambatan atau kendala yang lain yaitu pelaksanaan kegiatan diakhir tahun, hal ini berpengaruh terhadap peserta yang hadir karena banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD lain diwaktu yang bersamaan. Namun pada dasarnya BPBD telah mengupayakan mengundang peserta sesuai dengan target yang direncanakan.

➤ Solusi

Adapun solusi yang dapat ditempuh untuk kedepannya yaitu melaksanakan kegiatan kebencanaan di beberapa zona atau wilayah sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang diundang. Dan solusi selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan di awal tahun atau sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.

➤ Efisiensi Anggaran

Terdapat beberapa bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran ini yaitu :

- Efisiensi anggaran pada pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana dengan melibatkan dunia usaha seperti PT. Vale Indonesia Tbk, sehingga target awal yang direncanakan 2 kali simulasi dapat terlaksana.
- Efisiensi anggaran belanja material perlengkapan simulasi dengan memaksimalkan peralatan yang ada di BPBD.
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas dalam daerah, dimana pendistribusian surat/undangan dilakukan secara bersamaan untuk beberapa kegiatan sehingga mengefisienkan waktu dan biaya.

➤ Efisiensi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat difasilitasi dengan adanya papan himbuan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbuan peringatan dini tersebut serta melalui media sosial.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 3**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0.63%	0.61%	96,83%	545,852,000	316,559,300	57,99%
Program	Jumlah	500 org	487 org	97,4%	545,852,000	316,559,300	57,99%

Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan risiko bencana						
---	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel. 4**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	96,83%	57,99%	42,00%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sebesar 96,83% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 57,99%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 42,00%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu :

- Pelaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan KAK dan anggaran kas yang telah disusun.
- Pelaksanaan kegiatan yang terpusat pada suatu tempat (tidak berdasarkan zona/wilayah).
- Keterlambatan pengajuan RUP ke bagian ULP sehingga kegiatan Penyusunan Rencana Kontigensi Gempa tidak terealisasi

## 2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana” didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 5**  
**Capaian Indikator Kinerja Program ke -1**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran	Terlaksananya upaya preventif dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan risiko bencana	500 org	487 org	97,40%
a.	Kegiatan Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	150 org	149 org	99,33%
b.	Kegiatan Pelatihan tentang pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	150 org	147 org	98,00%
c.	Kegiatan Sosialisasi daerah rawan bencana	Terlaksananya sosialisasi daerah rawan bencana bagi relawan dan masyarakat	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	150 org	141 org	94,00%
d.	Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan TRC dan SAR dalam penanggulangan bencana	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	50 org	50 org	100%

### Analisis Program/Kegiatan

✓ Sasaran program “**Terlaksananya upaya preventif dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana**” dengan indikator kinerja program yaitu **Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan risiko bencana** yang diukur dengan

menghitung jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Realisasi indikator sasaran program ini tahun 2019 sebanyak 487 org atau sebesar 97,40% dari target 500 org (100%). Target yang tidak tercapai disebabkan karena pelaksanaan kegiatan diakhir tahun, hal ini berpengaruh terhadap peserta yang hadir karena banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD lain diwaktu yang bersamaan. Dan untuk memenuhi kekurangan dari target maka telah dilakukan beberapa upaya diantaranya yaitu :

- Pengusulan program/kegiatan melalui BPBD provinsi
- Kerjasama dengan Dunia Usaha dalam hal ini PT. Vale Indonesia Tbk dalam penyelenggaraan Simulasi Penanggulangan Bencana Banjir sebagai tindak lanjut dari Rencana Tindak Darurat (RTD) Penanganan Bendungan Seri Larona yang melibatkan OPD terkait, Tim Relawan, TNI/POLRI dan masyarakat.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana” sebagai berikut :

- Kegiatan Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan pemberian informasi terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta mengurangi dampak/risiko akibat bencana. Target *output* kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sebanyak 150 orang dan terealisasi sebanyak 149 orang (99,33%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Burau dan Kecamatan Mangkutana. Pesertanya berasal dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena, dan terdiri dari Tim Relawan dan masyarakat. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 88,44% disebabkan karena belanja cetak tidak direalisasikan terkendala waktu pelaksanaan yang sangat terbatas sementara bahan yang akan dicetak belum rampung sehingga bahan penyuluhan yang diberikan kepada peserta hanya materi dalam bentuk hardcopy/softcopy. Dan terdapat

belanja sewa mobilitas darat (biaya transportasi peserta) disebabkan karena terdapat peserta penyuluhan yang pulang sebelum penutupan dan hal tersebut berpengaruh terhadap realisasi keuangan.

- Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kita ketahui bahwa Kab. Luwu Timur berada pada iklim peralihan sehingga cuaca/iklim tidak dapat diprediksi, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terkait hal tersebut sehingga dapat meminimalisir korban jiwa jika terjadi bencana.

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Relawan dan Masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan resiko bencana serta adaptasi perubahan iklim sebanyak 150 orang dan yang hadir hanya 147 orang. Realisasi fisik (98%) dan realisasi keuangan sebesar 88,09%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Biaya Sewa Hotel/penginapan silpa nya cukup besar karena jumlah kamar hotel di tempat pelaksanaan terbatas jumlahnya sehingga SPJ pertanggungjawaban disesuaikan dengan jumlah kamar yang yang tersedia demikian juga dengan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak direalisasikan karena pendistribusian surat/undangan disatukan dengan kegiatan penyuluhan untuk mengefisienkan waktu dan anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Malili, dan pesertanya berasal dari 11 kecamatan dan terdiri dari Tim Relawan dan Masyarakat

- Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Relawan dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana sebanyak 150 orang dan terealisasi sebanyak 141 orang (94%). Adapun realisasi keuangannya 98,06%. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Angkona dan Wasuponda dan pesertanya berasal dari 5 kecamatan (Kec. Malili, Angkona, Nuha, Towuti dan Wasuponda)

- Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi Tim Reaksi Cepat dan SAR (Tim Relawan) dalam penanggulangan bencana dalam kondisi tanggap darurat.

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat sebanyak 50 orang dan terealisasi 50 orang (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kec. Malili dengan peserta terdiri dari TRC BPBD, Satpol PP dan Damkar, TAGANA, PMI Luwu Timur, SAR Malili, SAR Soroako dan SAR ligas. Adapun jenis pelatihan yang diberikan yaitu Teknik Penyelamatan di Ketinggian di Air (Water Rescue).

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana. Target *output* kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebanyak 27 unit dan terealisasi 27 unit (100%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96,61%. Adapun sarana dan prasarana penanggulangan yang diadakan yaitu Pengadaan Kantung Jenazah 24 unit, Pengadaan Chainsaw Kecil 2 unit dan Chainsaw Besar 1 unit.

- Kegiatan Pemetaan Potensi Ancaman Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan sebaran-sebaran ancaman bencana yang ada, kondisi kerentanan dan kapasitas aset penghidupan dan kehidupan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana. Target *output* kegiatan adalah tersedianya dokumen pemetaan ancaman bencana sebanyak 1 dokumen (Rencana Kontigensi Gempa Bumi namun tidak terealisasi (0%). Kegiatan tidak terlaksana disebabkan karena pada awalnya direncanakan untuk dapat disinkronkan dengan kegiatan Rencana Kontigensi dari BNPB, namun terkendala waktu sehingga kegiatan ini terlambat diajukan ke ULP dan referensi tenaga ahli terkait Renkon Gempa masih terbatas serta tidak ada standar besaran honor tenaga ahli (Billing Rate) dalam penyusunan Renkon Gempa.

- Kegiatan Apel Siaga Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinergitas seluruh instansi terkait untuk mempersiapkan Siaga Bencana. Target *output* kegiatan adalah terlaksananya Apel siaga Bencana sebanyak 1 kali dan terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 99,65%. Apel Siaga Bencana yang dilaksanakan dirangkaikan dengan pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yaitu tanggal 26 April setiap tahunnya. Adapun OPD atau organisasi/lembaga yang terlibat didalamnya yaitu Dinas Pendidikan (sekolah). Pelaksanaan Apel Siaga Bencana tersebut diikuti oleh Siswa/siswi SD sebanyak 200 org, dengan pertimbangan bahwa untuk menanamkan pengetahuan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di usia dini

- Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan meningkatkan kewaspadaan tentang bahaya bencana alam sehingga bila terjadi bencana maka akan meminimalisir korban bencana. Dalam kegiatan ini juga melatih kesiapan dalam keadaan darurat yang akan diantisipasi. Simulasi ini dirancang untuk memberikan pelatihan, mengurangi kebingungan/kepanikan dan memastikan kesiapan prosedur dan peralatan tanggap darurat. Target *output* kegiatan adalah terlaksananya Simulasi Penanggulangan Bencana sebanyak 1 kali dan terealisasi 100%. Simulasi yang dilakukan adalah Simulasi Penanggulangan Bencana (Gempa Bumi) diikuti oleh 450 siswa/siswi yang berasal dari SMPN 2 Malili dan SMPN 1 Wotu. Simulasi ini dilakukan dikalangan siswa/siswi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan serta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana.

## **SASARAN STRATEGIS II**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Kedua **“Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana”** tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 6**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -2**

Sasaran I	Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Bencana	97.06%	100%	103.03%

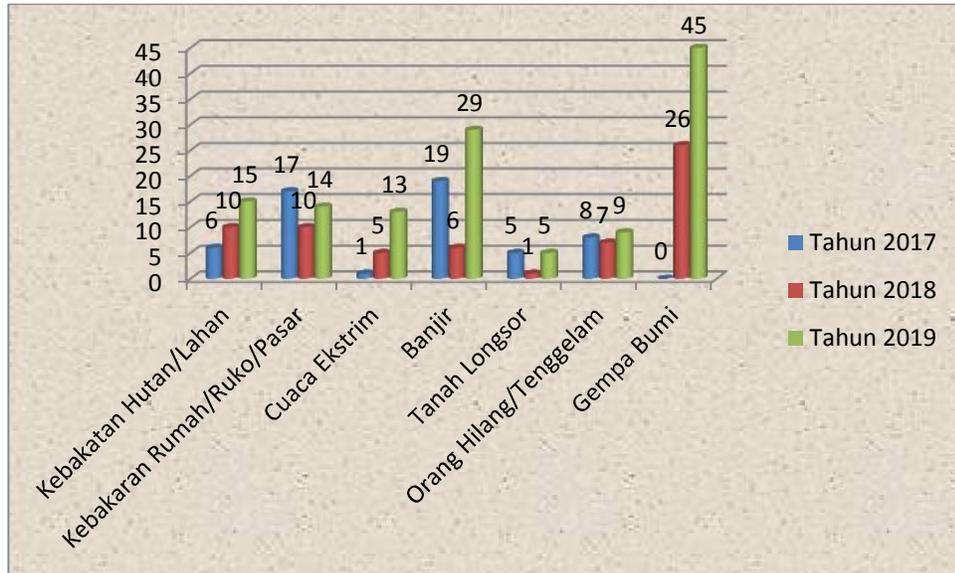
### 1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 2 tahun 2019

#### Persentase Penanganan Bencana

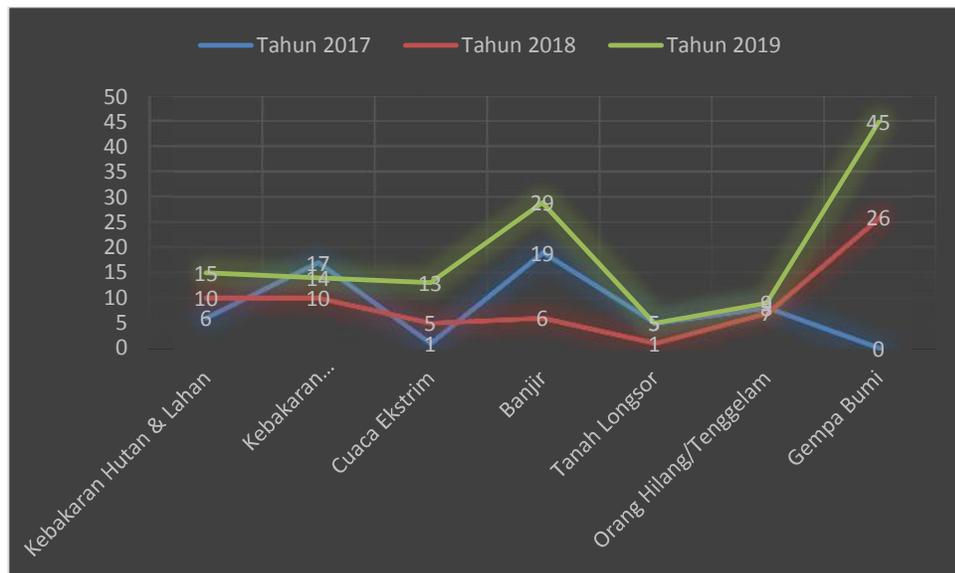
Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah kejadian bencana yang ditangani dibagi jumlah seluruh kejadian bencana yang terjadi x 100%)”*

Target dari indikator tersebut tertanganinya kejadian bencana pada tahun 2019 sebesar 97,06 % dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 103.03%. Penanganan kejadian bencana yang dilakukan terdiri dari penanganan bencana dilokasi kejadian, kunjungan ke lokasi pasca bencana, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, hunian sementara (tenda), kebutuhan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya, serta bantuan hibah bagi korban bencana kebakaran yang bersumber dari BPKD dengan rekomendasi dari BPBD. Dimana kesemua hal tersebut sudah tercakup dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur beserta OPD terkait seperti BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Perikanan, Kelautan dan Pangan, Dinas PU, Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar, serta OPD terkait lainnya. Berdasarkan data kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2019, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 130 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 29 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 15 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 14 Kejadian), Cuaca Ekstrim 13 Kejadian, Banjir 29 Kejadian, Tanah Longsor 5 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 9 Kejadian dan Gempa Bumi 45 kejadian. Jumlah kejadian

bencana tahun 2019 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada dasarnya BPBD Kab. Luwu Timur telah berupaya semaksimal mungkin agar semua kejadian bencana tersebut dapat tertangani dengan baik.



**Grafik. 7**  
**Data Kejadian Bencana Tahun 2017 – 2019**



**Trend Kejadian Bencana Tahun 2017 s.d 2019**

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Program Kedaruratan dan Logistik yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
- Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana
- Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Persentase Penanganan Bencana, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan personil dalam penanggulangan bencana
- Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- Rendahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana
- Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Memaksimalkan tenaga Tim Relawan seperti SAR, TAGANA yang tersebar di seluruh kecamatan
- Memberdayakan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ada di BPBD
- Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki
- Mengikutsertakan TRC BPBD pada kegiatan pelatihan ataupun Diklat tentang kebencanaan yang diadakan oleh BPBD Propinsi maupun BNPB.
- Penempatan Posko Darurat Bencana didaerah lokasi bencana
- Penempatan Posko Siaga Bencana di daerah rawan bencana
- Melakukan monitoring di lokasi rawan bencana serta lokasi pasca bencana
- Melakukan pendataan awal terkait jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait yang lokasinya berdekatan dengan pada daerah rawan bencana.

- Penempatan papan himbauan/peringatan dini bencana di beberapa titik rawan bencana.

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran 2 (dua) dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2019, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana seperti : Sandang, Tenda Gulung, Makanan Tambahan Gizi, Kids Ware, Perlengkapan Sekolah, Karung, Perlengkapan Makanan, Perlengkapan Rekreasi, Paket Perlengkapan Balita, Mie Instant, Beras, Masker, dan Matras.
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bantuan sosial dari dunia usaha dan masyarakat.
- Untuk biaya paket pengiriman bantuan logistik juga difasilitasi oleh BNPB yaitu biaya paket pengiriman dari Jakarta ke Makassar sehingga yang ditanggung hanya biaya dari Makassar ke Malili.

Anggaran yang tersedia untuk penanganan kedaruratan dan logistik korban bencana sangatlah terbatas, sehingga BPBD memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga penggunaan anggaran yang disediakan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik dapat diminimalisir.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran 2 (dua), maka dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019, didukung dengan adanya sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan dan sumberdaya anggaran. Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam

penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 33 orang yang terdiri dari 19 orang PNS, 3 orang Upah Jasa, dan 30 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Perhubungan dsb.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 7**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana	97,06%	100%	103,03%	1,344,665,000	1,077,333,562	80,12%
Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender tentang pengurangan risiko bencana	24%	68,89%	287,04%	1,344,665,000	1,077,333,562	80,12%

**Tabel. 8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana	103,03%	80,12%	19,88%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana sebesar 103,03% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 80,12%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 19,88%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- Kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC), Aparatur BPBD serta Tim Relawan Penanggulangan Bencana dalam merespon setiap kejadian bencana
- Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik yang dimiliki oleh BPBD maupun OPD terkait
- Ketersediaan sandang dan pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana yang ada di BPBD, Dinsos & P3A dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
- Adanya upaya dari Pemerintah dalam hal ini BPBD serta OPD terkait untuk selalu hadir ditengah masyarakat korban bencana.
- Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
- Fungsi koordinasi lintas OPD terkait penanggulangan bencana
- Sinkronisasi program/kegiatan antara pusat, propinsi dan kabupaten

## 2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana” didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dan dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel. 9**  
**Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Kedaruratan dan Logistik	Terlaksananya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender	20%	68,89 %	287.04%
a.	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Kej	72 Kej	720%
b.	Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	10 Kej	47 Kej	470%
c.	Kegiatan Penunjang operasional posko darurat bencana	Tersedianya operasional posko darurat bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	5 Kej	6 Kej	120%
d.	Kegiatan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	Terlaksananya pemberdayaan Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	30 org	30 org	100%

### Analisis Program/Kegiatan

✓ Sasaran program **“Terlaksananya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban**

**bencana”** dengan indikator kinerja program yaitu Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender yang diukur dengan menghitung jumlah kejadian bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi jumlah kejadian bencana yang terjadi dikali 100 persen.

Realisasi indikator sasaran program ini pada tahun 2019 adalah 68,89% atau sebesar 287,04% dari target 24%. Capaian yang melebihi target tidak lepas dari dukungan multi pihak seperti keterlibatan Jajaran Pemerintah Kab. Luwu Timur, TNI/POLRI, Tim Relawan Penanggulangan Bencana, Dunia Usaha dan masyarakat. Adapun keterlibatan mereka dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur yaitu :

- Ketersediaan anggaran dari Pemerintah Kab. Luwu Timur khususnya untuk BPBD, BPKD, Dinsos & P3A dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Satpol PP & Damkar serta OPD terkait lainnya.
- Ketersediaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan dari BNPB, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan serta OPD terkait lainnya.
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana dari Stakeholder terkait seperti TNI/POLRI, Tim Relawan dan Masyarakat
- Ketersediaan pangan dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
- Kerjasama dengan dunia usaha (PT. Vale Indonesia Tbk)

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana” sebagai berikut :

▪ Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Target *output* kegiatan adalah jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi

korban bencana sebanyak 10 kejadian dan terealisasi 72 kejadian. Kejadian bencana yang terfasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu

- Bencana Banjir sebanyak 28 kali kejadian (Desa Lanosi, Kawata, Kasintuwu, Wanasari, Maliwowo, Sumber Agung, Sumber Makmur, Argomulyo, Manggala, Manunggal, Alam Buana, Cendana Hitam Timur, Bahari, Karambua, Kalaena, Puncak Indah, Ussu, Laskap, Pongkeru, Balambano, Tole-Tole, Mahalona, Bonepute, Burau Pantai, Mantadulu dan Tawakua)
- Orang hilang sebanyak 8 kali kejadian (Bulu Poloe, Desa Bantilang, Pawosoi, Batu Putih, Balambano, Mahalona, Atue dan Kawata)
- Kebakaran rumah sebanyak 8 kali kejadian (Desa Bawalipu, Madani, Kalatiri, Wasuponda, Wawondula, Tole-Tole, Baruga dan Ledu-Ledu)
- Kebakaran Hutan & Lahan sebanyak 14 kali kejadian (Desa Puncak Indah, Pasi-Pasi, Wewangriu, Baruga, Malili dan Bantilang)
- Tanah longsor sebanyak 5 kali kejadian (Desa Kasintuwu, Bonepute dan Cendana)
- Cuaca Ekstrim sebanyak 9 kali kejadian (Desa Lera, Manggala, Karambua, Solo, Margolembo, Pattengko, Pancakarsa dan Tarengge)

Dari 130 kejadian terdapat 72 kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, selebihnya 58 kejadian tidak terhitung karena kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Pada dasarnya anggaran pada kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana

▪ Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang, pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya. Target *output* kegiatan adalah jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan dan kebutuhan dasarnya sebanyak 10 kejadian dan terealisasi sebanyak 47 kejadian (470%). Adapun kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan dan kebutuhan dasarnya yaitu :

- Bencana Banjir sebanyak 23 kali kejadian (Desa Kasintuwu, Wanasari, Maliwowo, Sumber Agung, Sumber Makmur, Argomulyo, Manggala, Manunggal, Alam Buana, Cendana Hitam Timur, Bahari, Karambua, Kalaena, Puncak Indah, Ussu, Laskap, Pongkeru, Balambano, Tole-Tole, Mahalona, Bonepute, Burau Pantai, Mantadulu dan Tawakua)
- Kebakaran rumah sebanyak 13 kali kejadian (Desa Bawalipu, Madani, Kalatiri, Wasuponda, Wawondula, Laro, Tabarano, Baruga dan Ledu-Ledu)
- Tanah longsor sebanyak 4 kali kejadian (Desa Kasintuwu, Bonepute dan Cendana)
- Cuaca Ekstrim sebanyak 8 kali kejadian (Desa Lera, Manggala, Solo, Pattengko, Pancakarsa dan Tarengge dan Paorebbae)

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 86,51% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 46.129.045,- Sisa anggaran terdiri dari Belanja Sandang Rp 10.912.000,- Belanja Paket Pengiriman Rp 19.600.000,- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Rp 6.098.350,- dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 9.518.695. Sisa anggaran yang cukup besar disebabkan karena pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan untuk mengantisipasi kejadian bencana/cuaca ekstrim di akhir tahun berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dengan memaksimalkan ketersediaan/stok sandang pada gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur selain itu juga didukung oleh persediaan pangan dari instansi terkait seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan. Sedangkan partisipasi atau bantuan dari dunia usaha serta masyarakat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan untuk korban bencana. Dan untuk biaya sewa/pengiriman logistik juga difasilitasi oleh pusat (BNPB).

- Kegiatan Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana  
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan Posko Darurat Bencana. Pembentukan Posko Darurat Bencana baru dapat dilakukan jika dalam Keadaan Darurat Bencana. Dalam kegiatan ini disediakan operasional

Posko Darurat Bencana. Target *output* kegiatan adalah tertanganinya kejadian tanggap darurat sebanyak 5 kejadian dan terealisasi 6 kejadian (120%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 87,05% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 29.413.850,-. Yang terdiri dari belanja sewa penginapan, belanja makanan dan minuman tamu, belanja makanan dan minuman kegiatan serta perjalanan dinas. Capaian kinerja kegiatan yang lebih dari 100% sedangkan serapan anggaran hanya 87,05%, disebabkan karena beberapa posko siaga dan posko tidak menggunakan biaya sewa penginapan dan makan minum tamu karena Tim Relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana tidak ada yang berasal dari luar kabupaten Luwu Timur. Dari 130 kejadian bencana yang terjadi di tahun 2019, hanya 6 kejadian bencana yang memerlukan pembentukan Posko Darurat Bencana dan Posko Siaga Bencana dan selebihnya langsung ditangani melalui penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pemberian bantuan bagi korban bencana. Adapun kejadian bencana yang terfasilitasi pembentukannya yaitu :

- Pembentukan Posko Siaga Bencana dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrim di Desa Mabonta Kec. Burau
- Posko Darurat Bencana dalam rangka penanganan banjir di Desa Mahalona Kec. Towuti
- Pembentukan Posko Darurat Bencana dalam rangka penanganan banjir di Desa Sumber Agung Kec. Kalaena
- Pembentukan Posko Darurat Bencana dalam rangka pencarian orang hilang di Desa Karambua Kec. Wotu
- Pembentukan Posko Darurat Bencana dalam rangka pencarian orang tenggelam di Desa Balambano Kec. Towuti
- Pembentukan Posko Darurat Bencana dalam rangka pencarian orang hilang di Desa Mahalona Kec. Towuti

Dan pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kejadian bencana.

- Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana. Dengan berdasarkan Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat, maka menjadi pedoman dalam pembentukan Tim Reaksi Cepat. Rekrutmen Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan jumlah personil sampai dengan tahun 2019 sebanyak 30 orang (upah jasa). Namun pada dasarnya semua personil BPBD Kab. Luwu Timur juga termasuk dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas pokok yaitu pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana. Adapun fungsi TRC dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat
2. Membantu BPBD Kabupaten/Kota untuk :
  - Mengaktivasi Posko BPBD Kabupaten/Kota
  - Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana
  - Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada SATLAK BPBD Kabupaten/Kota yang terdiri :
  - Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
  - Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil khusus)
  - Laporan lengkap/akhir penugasan

Target *output* kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan Tim Reaksi Cepat sebanyak 30 orang dan terealisasi 30 orang (100%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 79,13% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 165.793.000,- . Hal ini disebabkan karena direncanakan pembayaran honor upah jasa TRC selama 4 bulan, namun rekrutmen baru dilaksanakan pada triwulan IV dan SK

nya berlaku Oktober 2019 sehingga honor yang dibayarkan hanya 3 bulan dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap realisasi belanja makan minum harian pegawai (makan minum jaga TRC).

### SASARAN STRATEGIS III

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Kedua **“Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik”** tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 10**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -3**

Sasaran III		Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	18.18%	18.18%	100%	

#### 1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 3 tahun 2019

##### Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah obyek terdampak yang ditangani dibagi jumlah perkiraan keseluruhan obyek terdampak x 100%)”*

Target dari indikator tersebut yaitu penanganan rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana sebanyak 4 unit atau sebesar 18,18% dan terealisasi 100 %. Adapun pekerjaan fisik tersebut yaitu :

- Normalisasi Saluran Pembuang Sungai Tokke Desa Mantadulu Kec. Angkona
- Lanjutan Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili

- Pembangunan Bronjong Sungai Lepa- Lepa Kec. Bauru
- Pembangunan Bronjong Sungai Lembo Desa Margolembo Kec. Mangkutana.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana
- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana
- Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana
- Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi yaitu :

- Lambatnya proses pengadaan karena adanya pergantian PPK/Mutasi pejabat struktural, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan lebih lama.
- Adanya penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3 yang masih dalam tahap pembelajaran.
- Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan lelang ulang
- Terbatasnya personil BPBD dalam penanganan dan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan.

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan fisik oleh PPK
- Memaksimalkan fungsi pengawasan dari Konsultan Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari PPK

- PPK dan Pejabat Pengadaan serta Penyedia untuk lebih memahami dan mencermati penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3 dengan melakukan koordinasi dengan LPSE.

➤ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran 3 yaitu perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik pasca bencana, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pembiayaannya, maka BPBD berupaya mengidentifikasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana untuk dapat difasilitasi melalui pembiayaan pusat atau provinsi dengan mengajukan proposal, sehingga nantinya anggaran APBD yang digunakan dapat diminimalkan. Berdasarkan hasil koordinasi lintas OPD, terdapat beberapa kegiatan pasca bencana yang difasilitasi oleh OPD terkait seperti Pembangunan Jembatan Darurat pasca bencana banjir di Desa Mahalona Kec. Towuti dengan anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,-** (*Dua Ratus Juta Rupiah*), penanganan tanah longsor (Dsn. Batu Merah) di Kelurahan Malililni, pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan DED sedangkan pekerjaan fisiknya akan dilaksanakan pada TA. 2020. Efisiensi anggaran dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan dana lintas OPD terkait dalam perbaikan sarana dan prasarana fisik pasca bencana.

➤ Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian sasaran 3 terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 11**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	18,18%	18,18%	100%	1,295,350,159	1,161,384,502	89,66%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	4 unit	4 unit	100%	1,295,350,159	1,161,384,502	89,66%

**Tabel. 12**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	100%	89,66%	10,34%

Pencapaian sasaran strategis Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,66%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 10,34%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik secara periodik
- Koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana
- Memaksimalkan pelaksanaan pengawasan oleh PPK dan Konsultan Pengawas.

## 2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Keberhasilan pencapaian sasaran “Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik” didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dan dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel. 13**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik serta non fisik pasca bencana	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	4 unit	4 unit	100%
a.	Kegiatan Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pasca bencana	Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	2 unit	2 unit	100%
b.	Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	Terlaksananya rehabilitasi/rekonstruksi turap/talud/bronjong pasca bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	2 unit	2 unit	100%
c.	Kegiatan Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya dana pendampingan Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90%	18,70%	20.78%
d.	Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana	Tersedianya data hasil identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	1 Dok	1 Dok	100%

Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana	pasca bencana				
--	---------------	--	--	--	--

## Analisis Program/Kegiatan

✓ Sasaran program **“Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik serta non fisik pasca bencana”** dengan indikator kinerja program yaitu Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi yang diukur dengan menghitung jumlah sarana fisik dan nonfisik yang rusak akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi.

Realisasi indikator sasaran program ini pada tahun 2019 adalah 4 unit atau sebesar 100% dari target 4 unit. Target yang tercapai tidak lepas dari dukungan multi pihak seperti keterlibatan Jajaran Pemerintah Kab. Luwu Timur dalam hal ini OPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Permukiman & Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan, BPKD, Bappelitbangda, BPBD Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun keterlibatan mereka dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur yaitu :

- Ketersediaan anggaran dari Pemerintah Kab. Luwu Timur khususnya untuk BPBD Kab. Luwu Timur dan OPD terkait lainnya dalam penanganan/perbaikan sarana dan prasarana pasca bencana
- Koordinasi lintas OPD terkait hasil Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis “Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik” sebagai berikut :

- Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kondisi kerusakan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk akibat bencana untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi pelaksanaan kegiatan fisik

tahun berikutnya dan bahkan ditindaklanjuti dengan proposal ke BNPB. Target *output* kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%.

- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Target *output* kegiatan Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun sebanyak 2 unit dan 2 unit (100%) dengan serapan anggaran 94,69%. Pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Normalisasi Saluran Pembuang Sungai Tokke Desa Mantadulu Kec. Angkona da (P = 125 m, Bronjong = 59 m) dan Lanjutan Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili (P = 115 m, Rabat Beton = 170 m).

- Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana guna menanggulangi banjir. Target *output* kegiatan adalah Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi sebanyak 2 unit dan terealisasi 2 unit (100%). Pekerjaan fisik yang dilaksanakan yaitu Pekerjaan Pembangunan Bronjong Sungai Lepa- Lepa Kec. Burau ( P = 156 m) dan Pembangunan Bronjong Sungai Lembo Desa Margolembo Kec. Mangkutana ( P = 60 m).

- Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pendampingan Dana dari Pusat (APBN). Target *output* kegiatan adalah Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar 90% terealisasi 18,70% (20,78%). Penggunaan anggaran untuk tahun 2019 digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan pelaporan dan koordinasi terkait penyerahan laporan akhir pelaksanaan Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2017 s.d 2018 serta koordinasi runtuhnya tanggul Nasional di

Desa Teromu Kec. Mangkutana dan Kegiatan Mapping Asset Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Fisik Tahun Anggaran 2017. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan non APBD yang ada dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2020 antara lain :

1. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2019, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 130 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 29 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 15 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 14 Kejadian), Cuaca Ekstrim 13 Kejadian, Banjir 29 Kejadian, Tanah Longsor 5 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 9 Kejadian dan Gempa Bumi 45 kejadian. Jumlah kejadian bencana tahun 2019 lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dan kejadian bencana yang mendominasi di tahun 2018 2019 yaitu Gempa Bumi. Kejadian tersebut kebanyakan terjadi di Luar Kabupaten Luwu Timur namun terasa getarannya. Intensitas kejadian gempa bumi meningkat setelah terjadinya kejadian gempa bumi akibat pergerakan sesar palu koro. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut.
2. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan lahan yang tidak terkendali seperti pembakaran lahan/hutan, penebangan liar dan sebagainya berpotensi menimbulkan bencana banjir, tanah longsor dan bencana kekeringan. Pembukaan lahan dalam wilayah hutan pada Daerah Aliran Sungai Kalaena dan Larona menyebabkan meningkatnya aliran permukaan sehingga debit air Sungai Kalaena dan Sungai Larona bertambah setiap tahun. Luapan air Sungai Kalaena dan Sungai Larona

terjadi setiap curah hujan tinggi dan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Kondisi ini memerlukan upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana melalui program dan kegiatan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.
4. Kondisi geografis Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas pegunungan yang terjal dan luas, sungai yang lebar dan dalam serta daerah pesisir yang menjadi tempat hunian masyarakat berpotensi bahaya dan mengancam kehidupan masyarakat. Banyaknya korban manusia yang tenggelam di sungai, dilaut, dan hilang, membutuhkan upaya penyelamatan dan pencarian korban secara profesional. Olehnya itu keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan yang handal dibidang ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
5. Terjadinya perubahan bentang alam akibat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan diluar PT. Vale Indonesia Tbk.
6. Daerah rawan bencana (Penanganan Mitigasi Daerah Rawan Bencana)
7. Adanya Pandemi Covid 19 yang saat ini masih membutuhkan upaya serius dalam proses pencegahan dan penanganannya.
8. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
9. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
10. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil serta peralatan yang tersedia;

11. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

### **1.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis**

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang pada daerah-daerah yang rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana.
- b. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.
- c. Segera menyusun Rencana Kontijensi ancaman Gempa Bumi, Longsor, Banjir Bandang (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- d. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- e. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.
- f. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- g. Menegakkan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dengan tegas.
- h. Membentuk Forum PRB dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah
- i. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD
- j. Mengalokasikan 0.5% APBD untuk Belanja Tidak terduga khusus bencana

- k. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- l. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.
- m. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- n. Membentuk Pos Terpadu Pelayanan Kedaruratan di Kabupaten Luwu Timur yang secara khusus dan professional menangani penyelamatan dan pencarian korban bencana.
- o. Menindaklanjuti Rencana Tanggap Darurat PT. Vale Indonesia Tbk. Terkait penanganan Dam Larona.
- p. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- q. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2020**  
**Kabupaten Luwu Timur**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2,337,627,000					1,846,197,115	
	Gaji dan Tunjangan	Terbayamya gaji & tunjangan aparatur BPBD	BPBD	21 orang	1,464,311,000	Gaji dan Tunjangan	Terbayamya gaji & tunjangan aparatur BPBD	BPBD	18 orang	1,166,966,115	
	Tambahan Penghasilan Lainnya	Terbayamya tambahan penghasilan aparatur BPBD	BPBD	21 orang	873,316,000	Tambahan Penghasilan Lainnya	Terbayamya tambahan penghasilan aparatur BPBD	BPBD	18 orang	679,231,000	
	BELANJA LANGSUNG				5,280,988,900	BELANJA LANGSUNG				2,700,411,440	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	850,679,900	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	539,120,100	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)	BPBD	850 surat	4,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)	BPBD	850 surat	2,526,500	

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	BPBD	Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air kantor sebanyak 60 rekening	78,649,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	BPBD	Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air kantor sebanyak 42 rekening	64,500,000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	BPBD	Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang	20,800,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	BPBD	Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang	16,269,000	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	BPBD	Pemeliharaan komputer 6 unit, notebook 8 unit, Printer 10 unit, AC 6 unit, LCD 1 unit, Kamera 1 unit, Finger print 1 unit, Mesin babat 1 unit, Perahu Karet 3 unit, Genset 2 unit, Watertreatment 1 unit, Tenda Posko 2 unit, Tenda Keluarga 5 unit, Tenda Pleton 2 unit, Tabung Alat Selam 6 unit, Tabung Pemadam Kebakaran 22 unit, Chainsaw 1 unit, Tenda Pengungsi 2 unit, Wireless 1 unit (105 unit)	60,450,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	BPBD	Pemeliharaan komputer 8 unit, notebook 8 unit, Printer 12 unit, AC 6 unit, Perahu Karet 2 unit, Genset 2 unit, Alkon 2 unit, Mesin Perahu Karet 6 unit, Tenda Posko 2 unit, Lighting Tower 1 unit, Chainsaw 2 unit, (52 unit)	15,000,000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	BPBD	50 jenis	30,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	BPBD	47 jenis	15,316,000	

6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPBD	3 jenis	48,350,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPBD	3 jenis	18,250,000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	BPBD	Tersedianya komponen alat listrik kantor sebanyak 8 jenis	17,500,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	BPBD	Tersedianya komponen alat listrik kantor sebanyak 8 jenis	15,000,000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	BPBD	Koran lokal 12 expl, regional 36 expl dan nasional 12 expl (60 expl)	7,200,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	BPBD	Koran lokal 12 expl, regional 36 expl dan nasional 12 expl (60 expl)	6,120,000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	BPBD	2 jenis	19,198,400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	BPBD	2 jenis	19,725,600
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	BPBD	1000 kotak	20,575,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	BPBD	568 kotak	11,265,000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	BPBD	47 kali	295,780,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	BPBD	36 kali	203,990,000

12	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	BPBD	5 orang	118,000,000	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	BPBD	4 orang	66,000,000	
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	45,925,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	13,350,000	
14	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	220 Kali	84,052,300	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	253 Kali	71,808,000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		100%	340,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		100%	109,711,933	
15	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Tersedianya Pembayaran Retensi Pekerjaan Penataan Halaman Kantor			-	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Tersedianya Pembayaran Retensi Pekerjaan Penataan Halaman Kantor	BPBD	1 Paket	14,711,933	
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPBD	3 unit	100,000,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPBD	0 unit	-	

17	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	BPBD	20 unit	100,000,000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	BPBD	0 unit	-	
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BPBD	2 Unit	20,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BPBD	1 Unit	5,000,000	
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	BPBD	15 unit	120,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	BPBD	11 unit	90,000,000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya		10 orang	75,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya		0 orang	-	
20	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan	Dalam dan Luar Daerah	10 Orang	75,000,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan	Dalam dan Luar Daerah	0 Orang	-	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu (%)		100%	12,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu (%)		100%	7,678,500	

21	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	BPBD	1 Dokumen	6,000,000	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	BPBD	1 Dokumen	3,928,500
22	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	BPBD	3 Dokumen	6,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	BPBD	3 Dokumen	3,750,000
VI	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu		100%	12,500,000	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu		100%	6,960,000
23	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	BPBD	6 Dokumen	12,500,000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	BPBD	6 Dokumen	6,960,000
VII	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruks		4 Unit	1,780,627,750	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruks		3 Unit	732,274,907
24	Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Kab. Luwu Timur	1 Dokumen	80,577,750	Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Kab. Luwu Timur	1 Dokumen	20,187,500

25	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Luwu Timur	90%	165,000,000	Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD	Kab. Luwu Timur	90%	23,255,000	
26	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana	Jumlah Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana yang dibangun	Kab. Luwu Timur	1 unit	440,000,000	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana	Jumlah Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana yang dibangun	Kab. Luwu Timur	0 unit	-	
27	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	Kec. Burau	1 unit	534,050,000	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	Kec. Burau	1 unit	224,855,405	
28	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	Kec. Mangkutana	2 unit	561,000,000	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	Kec. Mangkutana	2 unit	463,977,002	
VIII	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana		500 orang	699,857,000	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana		0 orang	-	
29	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	BPBD	83 unit	99,812,000	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	BPBD	0 unit	-	

30	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	2 Kali	35,865,000	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	0 Kali	-
31	Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Luwu Timur	150 orang	82,150,000	Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Luwu Timur	0 orang	-
32	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	Simulasi 2 kali	64,385,000	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	0 kali	-
33	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	Kab. Luwu Timur	50 orang	122,415,000	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	Kab. Luwu Timur	0 orang	-
34	Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Luwu Timur	150 orang	222,530,000	Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Luwu Timur	0 orang	-
35	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	Kab. Luwu Timur	150 orang	72,700,000	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0 orang	-

IX	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender		20%	1,510,324,250	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender		20%	1,304,666,000	
36	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Luwu Timur	10 kejadian	219,974,250	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Luwu Timur	10 kejadian	136,555,000	
37	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	Kab. Luwu Timur	10 kejadian	160,590,000	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	Kab. Luwu Timur	10 kejadian	137,611,000	
38	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	Kab. Luwu Timur	5 kejadian	99,500,000	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	Kab. Luwu Timur	5 kejadian	142,175,000	
39	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	BPBD dan Lokasi Bencana	30 Orang	1,030,260,000	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	BPBD dan Lokasi Bencana	29 Orang	888,325,000	
JUMLAH TOTAL					7,618,615,900	JUMLAH TOTAL					4,546,608,555

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan. program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahaan/ Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2020 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyesuaian program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten maka ditetapkan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ng Tahun 2020 memuat 6 Program 28 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.546.608.555,-

Program dan kegiatan prioritas berdasarkan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**Tabel. 4 (T-C.32)**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kabupaten Luwu Timur**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>				
1.	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana (Normalisasi Sungai Asuli Desa Langkea Raya Kec. Towuti)	Kec. Towuti	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air yang dibangun	700 m	
2.	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana (Lanjutan Kedua Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili dan Lanjutan Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili)	Kec. Malili	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air yang dibangun	135 m dan 200 m	Tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan melalui Dana Hibah dari BNPB, namun masih perlu lanjutan/penambahan agar lebih maksimal pengendalian banjir dilokasi tersebut sehingga diusulkan penganggaran APBD
3.	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/bronjong (Pekerjaan Talud Dusun Bunga Tanah – Dusun Kunyi-kunyi Desa Kalaena)	Kec. Wotu	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	1000 m	
4	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/bronjong (Pekerjaan Talud Dusun Poleonro Desa Kalaena)	Kec. Wotu	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air yang dibangun	200 m	

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1 Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana**

Arah kebijakan nasional penanggulangan bencana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 beserta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008.

Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asas penanggulangan bencana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yaitu :

1. Keadilan
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
3. Keseimbangan
4. Ketertiban dan kepastian hukum
5. Kebersamaan
6. Kelestarian lingkungan hidup
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu cepat dan tepat, prioritas, kordinasi dan keterpaduan, berdaya dan hasil guna, transparansi dan akuntalibitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproseliti yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

##### **.3.1.2 RPJMN IV (2020-2024)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, merupakan tahapan terakhir dari RPJPN (2005-2025) sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan

dalam RPJPN. Sesuai RPJPN 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 yaitu :

1. Kelembagaan Politik dan Hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. **“ Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”**
7. Memperkuat stabilitas Polhukkanham dan tranformasi pelayanan publik.

Terkait Agenda ke-6, maka Pembangunan Nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, dan akan diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana
3. Pembangunan Rendah Karbon.

Terkait dengan **“Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim”**, maka agenda konvergensi antara Adaptasi Perubahan Iklim (API) dengan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) semakin ditingkatkan dalam periode 5 tahun terakhir. Baik melalui kegiatan perencanaan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan, serta peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam perundingan dan kerjasama internasional.

### **3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020**

Berdasarkan Permendagri **Nomor 31 Tahun 2020**, dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020) yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”** maka sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2. **“Infrastruktur dan pemerataan wilayah”**
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
4. **“Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup”**
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Jadi dalam hal ini, Prioritas Nasional yang harus diwujudkan terkait Penanggulangan Bencana yaitu Prioritas 2 (dua) yaitu **“Infrastruktur dan pemerataan wilayah”** dengan arah kebijakan yang tempuh yaitu **“Meningkatkan Standar Bangunan dan Memperkuat Rantai Pasokan Konstruksi melalui Inovasi kebencanaan”**, dan Program Nasional yang perlu dilakukan adalah Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana dan Prioritas 4 (empat) yaitu **“Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup”** dengan

arah kebijakan **“Mengoptimalkan Pembangunan Berketahanan Bencana”** dan Program Nasional yang perlu dilaksanakan yaitu Penguatan Ketahanan Bencana

### **3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan**

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2020 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan.

Adapun Bidang Urusan terkait Penanggulangan Bencana yaitu **“Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat”**, dengan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu Percepatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam menyusun RKPD Tahun 2020 terkait SPM Penanggulangan Bencana yaitu :

1. Layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian risiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana
2. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontigensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi
3. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, evakuasi dan pertolongan korban bencana.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel

### 1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah:

1. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2. Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana.
3. Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD.

**Tabel.5**  
**Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2020**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0.63%
			Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi	Persentase penanganan bencana (%)	100%

			masyarakat korban bencana		
			Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (%)	18.18%
2.	Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	Prestasi LAKIP berdasarkan Opini Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah Skor LAKIP	70

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merencanakan 6 program dengan 28 kegiatan, yang terdiri dari 2 program utama dengan 8 kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 5 program pendukung dengan 20 kegiatan yang menunjang tugas kesekretariatan agar fungsi organisasi SKPD dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### 3.1.1 Program Utama

##### 1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

- a. Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana
- b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD
- c. Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana
- d. Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana

## **2. Program Kedaruratan dan Logistik**

- a. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- b. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
- c. Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana
- d. Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)

### **3.1.2 Program Pendukung**

#### **1. Program Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- l. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- m. Monitoring dan Evaluasi
- n. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

**4. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

## xRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2020 KABUPATEN LUWU TIMUR

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-																		
0.00.1 .05.02 .05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									12,000,000	7,678,500	(4,321,500)						
0.00.1 .05.02 .05.06	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	-	Laporan Kinerja	SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	3,928,500	(2,071,500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	berjalan	BPB D
0.00.1 .05.02 .05.08	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	-	Laporan Keuangan dan Semesteran	SKPD	SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	6,000,000	3,750,000	(2,250,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	berjalan	BPB D
0.00.1 .05.02 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									825,679,900	539,120,100	(286,559,800)						

*RENCANA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

0.00.1 .05.02 .01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	-	Kesekretariatan BPBD	SKPD	SKPD	850 surat	850 surat	4,200,000	2,526,500	(1,673,500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 surat	-	berjalan	BPBD
0.00.1 .05.02 .01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	-	Aparatur BPBD	SKPD	SKPD	60 eksemplar	60 eksemplar	7,200,000	6,120,000	(1,080,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 eksemplar	-	berjalan	BPBD
0.00.1 .05.02 .01.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	-	Kantor BPBD dan Gudang Logistik	SKPD	SKPD	8 jenis	8 jenis	17,500,000	15,000,000	(2,500,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	BPBD
0.00.1 .05.02 .01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Bencana	SKPD	SKPD	2 jenis	2 jenis	19,198,400	19,725,600	527,200	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	BPBD
0.00.1 .05.02 .01.12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	-	Kesekretariatan SKPD	SKPD	SKPD	1.000 Kotak	568 Kotak	20,575,000	11,265,000	(9,310,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kotak	-	berjalan	BPBD

0.00.1 .05.02 .01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	-	Tenaga Kebersihan Kantor	SKPD	SKPD	1 orang	1 orang	20,800,000	16,269,000	(4,531,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 orang	-	berjalan	BPB D
0.00.1 .05.02 .01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	-	Kesekretariatan SKPD	SKPD	SKPD	50 jenis	47 jenis	30,000,000	15,316,000	(14,684,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	BPB D
0.00.1 .05.02 .01.21	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	-	Lokasi Pasca Bencana, Korban Bencana dan Monev Penyertaan Anggaran Program dan Kegiatan	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA, WASUPONDA	WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASUPONDA, KALAENA, MANGKUTANA, TOMONI, TOWUTI, BURAU	4 Dokumen	4 Dokumen	40,925,000	13,350,000	(27,575,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	berjalan	BPB D
0.00.1 .05.02 .01.09	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	Kesekretariatan SKPD	SKPD	SKPD	3 jenis	3 jenis	48,350,000	18,250,000	(30,100,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 jenis	-	berjalan	BPB D
0.00.1 .05.02 .01.07	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	-	Peralatan Kantor BPBD	SKPD	SKPD	105 unit	52 unit	55,450,000	15,000,000	(40,450,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 unit	-	berjalan	BPB D
0.00.1 .05.02 .01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah rekening bulanan telepon, air	Jumlah rekening bulanan telepon,	-	Kantor BPBD dan Gudang	SKPD	SKPD	60 Rekening	42 Rekening	78,649,200	64,500,000	(14,149,200)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Rekening	-	berjalan	BPB D

	Daya Air dan Listrik	dan listrik yang terbayarkan	air dan listrik yang terbayarkan		Logistik													
0.00.1 .05.02 .01.22	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	-	Aparatur dan Upah Jasa BPBD	ANGKONA, TOMONI, TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI, ANGKONA, WASUP ONDA, KALAE NA, MANGKUTANA, TOMONI, TOWUTI, BURAU	220 Kali	253 Kali	79,052,300	71,808,000	(7,244,300)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	BPBD
0.00.1 .05.02 .01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	-	Upah Jasa BPBD	SKPD	SKPD	5 orang	4 orang	118,000,000	66,000,000	(52,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 orang	-	berjalan	BPBD
0.00.1 .05.02 .01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang	-	Apartur dan Upah Jasa BPBD	FALSE	FALSE	47 Kali	36 Kali	285,780,000	203,990,000	(81,790,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	BPBD

		n	dilaksanakan															
<b>0.00.1</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									<b>60,000,000</b>	<b>-</b>	<b>(60,000,000)</b>						
<b>.05.02</b>																		
<b>.04</b>																		
0.00.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan	-	Aparatur BPBD	FALSE	FALSE	10 Orang	0 Orang	60,000,000	-	(60,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	
<b>0.00.1</b>	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>									<b>12,500,000</b>	<b>6,960,000</b>	<b>(5,540,000)</b>						
<b>.05.02</b>																		
<b>.06</b>																		
0.00.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	-	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	SKPD	SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	12,500,000	6,960,000	(5,540,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	berjalan	BPBD
<b>0.00.1</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									<b>340,000,000</b>	<b>109,711,933</b>	<b>(230,288,067)</b>						
<b>.05.02</b>																		
<b>.02</b>																		
0.00.1	Pembangunan Gedung Lainnya		Tersedianya Pembayaran Retensi Pekerjaan Penataan Halaman Kantor	-	Kantor BPBD		Kabupaten, MALILI		1 Paket	-	14,711,933	14,711,933	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Paket	-	baru	BPBD
<b>.05.02</b>																		
<b>.02.51</b>																		
0.00.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	Kantor BPBD	SKPD	SKPD	2 Unit	1 Unit	20,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	berjalan	BPBD

	kantor																	
0.00.1 .05.02 .02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-		SKPD	SKPD	3 Unit	0 Unit	100,000,000	-	(100,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	berjalan	BPBD
0.00.1 .05.02 .02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	-		SKPD	SKPD	20 Unit	0 Unit	100,000,000	-	(100,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	berjalan	BPBD
0.00.1 .05.02 .02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	Kendaraan Dinas/Operasional BPBD	SKPD	SKPD	15 Unit	11 Unit	120,000,000	90,000,000	(30,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	berjalan	BPBD
Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
1.05.1 .05.02 .53	Program Kedaruratan dan Logistik									1,470,324,250	1,304,666,000	(165,658,250)						

1.05.1 .05.02 .53.03	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	-	Korban Bencana	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU , TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASUP ONDA, KALAE NA, MANGK UTANA, TOMONI , TOWUTI, BURAU	5 Kejadian	5 Kejadian	99,500,000	142,175,000	42,675,000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kejadian	-	berjalan	BPB D
1.05.1 .05.02 .53.02	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	-	Korban Bencana	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU , TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASUP ONDA, KALAE NA, MANGK UTANA, TOMONI , TOWUTI, BURAU	10 Kejadian	10 Kejadian	160,590,000	137,611,000	(22,979,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kejadian	-	berjalan	BPB D

1.05.1 .05.02 .53.01	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	Korban Bencana	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASUP ONDA, KALAE NA, MANGKUTANA, TOMONI, TOWUTI, BURAU	10 Kejadian	10 Kejadian	219,974,250	136,555,000	(83,419,250)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kejadian	-	berjalan	BPB D
1.05.1 .05.02 .53.04	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanganan bencana	-	Korban Bencana dan TRC	Kabupaten	Kabupaten	30 orang	29 orang	990,260,000	888,325,000	(101,935,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 orang	-	berjalan	BPB D
1.05.1 .05.02 .60	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi									1,415,627,750	732,274,907	(683,352,843)						

1.05.1 .05.02 .60.13	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat Pasca Bencana	Jumlah jalan/jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	Jumlah jalan/jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	-		ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	FALSE	1 Unit	0 Unit	-	-	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	berjalan	BPB D	
1.05.1 .05.02 .60.06	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	-	Lokasi Pasca Bencana	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASUP ONDA, KALAE NA, MANGKUTANA, TOMONI, TOWUTI, BURAU		1 Dokumen	1 Dokumen	80,577,750	20,187,500	(60,390,250)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	berjalan	BPB D

1.05.1 .05.02 .60.10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	Pendampingan Dana Non APBD	Kabupaten	Kabupaten	90 Persen	90 Persen	165,000,000	23,255,000	(141,745,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Persen	-	berjalan	BPBD
1.05.1 .05.02 .60.07	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pasca Bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	-	Lokasi Pasca Bencana	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	MALILI	2 Unit	1 Unit	534,050,000	224,855,405	(309,194,595)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	berjalan	BPBD

1.05.1 .05.02 .60.08	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	-	Lokasi Pasca Bencana	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	WOTU	2 unit	2 unit	636,000,000	463,977,002	(172,022,998)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 unit	-	berjalan	BPBD
<b>1.05.1 .05.02 .62</b>	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>									<b>651,783,770</b>	<b>-</b>	<b>(651,783,770)</b>						
1.05.1 .05.02 .62.06	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	-	BPBD dan OPD Terkait	Kabupaten	FALSE	2 Kali	0 Kali	35,865,000	-	(35,865,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	BPBD
1.05.1 .05.02 .62.07	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	-	BPBD, OPD Terkait dan Masyarakat	Kabupaten	FALSE	2 Kali	0 Kali	64,385,000	-	(64,385,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	BPBD

1.05.1 .05.02 .62.04	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	-	Tim Relawan dan Masyarakat	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	FALSE	150 Orang	0 Orang	72,700,000	-	(72,700,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	BPBD
1.05.1 .05.02 .62.02	Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	Tim Relawan dan Masyarakat	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUP ONDA	FALSE	150 Orang	0 Orang	82,150,000	-	(82,150,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	BPBD

1.05.1 .05.02 .62.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	-	Kantor BPBD	SKPD	FALSE	83 Unit	0 Unit	99,812,000	-	(99,812,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	berjalan	BPBD
1.05.1 .05.02 .62.08	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	-	TRC, SAR dan Tim Relawan Penanggulangan Bencana	Kabupaten	FALSE	50 Orang	0 Orang	122,415,000	-	(122,415,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	BPBD
1.05.1 .05.02 .62.03	Pelatihan Tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	-	Tim Relawan dan Masyarakat	ANGKONA, TOMONI TIMUR, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA, WASUPONDA	FALSE	150 Orang	0 Orang	174,456,770	-	(174,456,770)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	BPBD
<b>JUMLAH</b>										4,787,915,670	2,700,411,440	(2,087,504,230)				-		

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2020, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, Juli 2020

**KEPALA PELAKSANA,**  
  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004

